

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 25 Agustus 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antaranews.com	Selasa, 25 Agustus 2020	Tol Sibanceh magnet awal menuju Aceh maju	<p>Aceh sebagai "pintu gerbang" barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu dinilai memiliki posisi strategis untuk menarik investasi dari berbagai negara, khususnya dari Timur Tengah dan India.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1686358/tol-sibanceh-magnet-awal-menuju-aceh-maju</p> <p>https://waspadaaceh.com/2020/08/24/selasa-besok-presiden-jokowi-resmikan-tol-banda-aceh-sigli/</p>
2	Antaranews.com	Senin, 24 Agustus 2020	Tujuh situ di Bogor akan direvitalisasi untuk tangkal banjir	<p>Kodam III/Siliwangi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR akan merevitalisasi tujuh situ di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menangkal banjir.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1686166/tujuh-situ-di-bogor-akan-direvitalisasi-untuk-tangkal-banjir</p>
3	Antaranews.com	Senin, 24 Agustus 2020	BBPJN Sumsel realisasikan program padat karya revitalisasi drainase	<p>Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mulai merealisasikan program Padat Karya Tunai untuk merevitalisasi drainase jalan sejauh 150 kilometer.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1685846/bbpjn-sumsel-realisasikan-program-padat-karya-revitalisasi-drainase</p>
4	Antaranews.com	Senin, 24 Agustus 2020	KONI: kesiapan infrastruktur PON Papua capai 75 persen	<p>Kesiapan infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2021 sudah mencapai 75 persen, sebagaimana penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Suwarno.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1685210/koni-kesiapan-infrastruktur-pon-papua-capai-75-persen</p>
5	Antaranews.com	Senin, 24 Agustus 2020	PUPR dukung pengembangan daerah tertinggal perbatasan dan perdesaan	<p>Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1684858/pupr-dukung-pengembangan-daerah-tertinggal-perbatasan-dan-perdesaan</p>
6	Antaranews.com	Senin, 24 Agustus 2020	Menteri PUPR: Sektor perumahan jadi "leading" pemulihan ekonomi	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa sektor perumahan (properti) dapat menjadi salah satu leading sector dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1684554/menteri-pupr-sektor-perumahan-jadi-leading-pemulihan-ekonomi</p>
7	Timesindonesia.com	Senin, 24 Agustus 2020	Kementerian PUPR RI: Jembatan Teluk Kendari Siap Dukung Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari, Ditjen Bina Marga tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km yang menghubungkan kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan Kecamatan Poasia di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292643/kementerian-pupr-ri-jembatan-teluk-kendari-siap-dukung-pengembangan-pelabuhan-bungkutoko</p>
8	Lampost.co	Senin, 24 Agustus 2020	Kementerian PUPR Siapkan Anggaran	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan pagu anggaran Rp100 miliar untuk</p>

			Rp100 Miliar untuk 8 Ruas Jalan di Lampung	delapan ruas jalan di Lampung yang teralokasi untuk 2021 mendatang. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. https://www.lampost.co/berita-kementerian-pupr-siapkan-anggaran-rp100-miliar-untuk-8-ruas-jalan-di-lampung.html
9	Matasulsel.com	Senin, 24 Agustus 2020	Terima Hibah Aset Infrastruktur 5 Jembatan dari Kementerian PUPR, Begini Harapan Bupati Jeneponto	Pemerintah Kabupaten Jeneponto terima hibah aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa infrastruktur jembatan yang telah selesai pembangunannya dan ke depan akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Jeneponto. http://matasulsel.com/terima-hibah-aset-infrastruktur-5-jembatan-dari-kementerian-pupr-begini-harapan-bupati-jeneponto/
10	Antarane.ws.com	Senin, 24 Agustus 2020	Pemerintah ingin setiap warga miliki rumah, ini langkahnya	Pemerintah dalam Peringatan Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2020 mengangkat tema Rumah #1 yang bermakna bahwa pemerintah ingin agar setiap warga negara Indonesia memiliki rumah guna mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. https://www.antarane.ws.com/berita/1685666/pemerintah-ingin-setiap-warga-miliki-rumah-ini-langkahnya
11	Kompas, halaman 11	Selasa, 25 Agustus 2020	Presiden Joko Widodo Akan Meresmikan Ruas Tol Pertama di Aceh	Masih dalam suasana peringatan 75 tahun kemerdekaan RI dan 15 tahun perjanjian damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, jalan tol pertama di Aceh sepanjang 13,5 kilometer siap beroperasi.
12	Kompas, halaman 16	Selasa, 25 Agustus 2020	Upaya Bina Marga Pulihkan Ekonomi pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	Pemerintah melalui Kementerian PUPR kembali menggalakkan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
13	Bisnis Indonesia, halaman 7	Selasa, 25 Agustus 2020	Ruang Bertumbuh Sektor Baru	Setelah ekonomi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sempat lesu pada 2015, pemindahan Ibukota Negara (IKN) diharapkan memberikan dampak positif. Ekonomi Kaltim yang selama ini digerakan oleh pemanfaatan sumber daya alam, seperti tambang dan mineral, boleh jadi bakal bergeser.

Judul	Presiden Joko Widodo Akan Meresmikan Ruas Tol Pertama di Aceh	Tanggal	Selasa, 25 Agustus 2020
Media	Kompas, halaman 11		
Resume	Masih dalam suasana peringatan 75 tahun kemerdekaan RI dan 15 tahun perjanjian damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, jalan tol pertama di Aceh sepanjang 13,5 kilometer siap beroperasi.		

INFRASTRUKTUR

Presiden Joko Widodo Akan Meresmikan Ruas Tol Pertama di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS — Masih dalam suasana peringatan 75 tahun kemerdekaan RI dan 15 tahun perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, jalan tol pertama di Aceh sepanjang 13,5 kilometer siap beroperasi. Presiden Joko Widodo direncanakan mengunjungi Banda Aceh, Selasa (25/8/2020), untuk meresmikan jalan tol seksi IV bagian dari ruas Banda Aceh-Sigli sejauh 74,2 kilometer.

Jalan tol tersebut masuk jaringan Tol Trans-Sumatera dari Banda Aceh hingga Bakauheni, Lampung, sepanjang 2.974 kilometer. Kesiapan tol Banda Aceh-Sigli seksi IV menjadi simbol besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Aceh.

Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto melalui keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, Senin (24/8/2020), menjelaskan, jalan tol seksi IV yang telah rampung adalah bagian dari enam seksi dengan lima seksi lagi dalam tahap konstruksi 50 persen dan pengadaan tanah 86 persen. Hutama Karya menargetkan ruas Banda Aceh-Sigli beroperasi pada akhir 2021.

"Pembangunan tol pertama di Aceh cukup pesat. Selama 18 bulan rampung," kata Budi.

Budi mengatakan, Jalan Tol Banda Aceh-Sigli seksi IV akan dibuka untuk umum setelah diresmikan Presiden Joko Widodo. Gerbang tol berada sekitar 3 kilometer dari Bandara Internasional Sultan Iskandar



Jalan Tol Trans-Sumatera seksi IV sepanjang 13,5 kilometer dari Blang Bintang-Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, rampung seperti terlihat pada Senin, (24/8/2020). Jalan tol seksi IV itu akan dibuka untuk umum setelah diresmikan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Selasa (25/8/2020) ini. Ruas ini bagian dari pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km. PT Hutama Karya menargetkan Tol Banda Aceh-Sigli beroperasi pada akhir 2021.

Muda, Aceh Besar, sehingga memudahkan konektivitas transportasi.

Konektivitas

Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) merupakan program strategis nasional untuk membangun konektivitas antarprovinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah menargetkan jalan bebas hambatan terhubung dari

Aceh hingga Lampung tahun 2024 sehingga konektivitas antardaerah semakin lancar dan biaya logistik kian efisien. Saat ini di Banda Aceh, pemerintah daerah bersama pihak terkait sibuk mempersiapkan prosesi peresmian jalan tol perdana di Aceh. Kehadiran Presiden Joko Widodo meresmikan langsung bagian dari pembangunan infrastruktur di Aceh menunjuk-

kan begitu besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Aceh.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sofyan Saleh, mengatakan, kehadiran tol di Aceh mempermudah akses transportasi darat. Selama ini, satu-satu jalan representatif antarkabupaten adalah jalan nasional lintas Sumatera. Jalan tersebut di-

gunakan semua jenis transportasi darat, seperti angkutan umum, sepeda motor, dan angkutan barang. "Dengan ada tol, daya tempuh semakin cepat," kata Sofyan.

Tol Banda Aceh-Sigli akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari biasanya 2 jam menjadi 45 menit. Sofyan mengatakan, kecepatan waktu tempuh membuat biaya perjalanan semakin murah.

Jafaruddin (45), pengusaha jasa kargo, mengatakan, kehadiran jalan tol akan membuat waktu tempuh dan biaya angkut dari Sumatera Utara ke Banda Aceh lebih efisien. Waktu perjalanan dari Medan, Sumut, ke Banda Aceh yang selama ini 60 jam menjadi 24 jam saja.

Bantuan masker

Dalam kunjungan kerja ke Aceh, Presiden Jokowi juga akan memantau langsung penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menyerahkan bantuan. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Jakarta, Senin, mengatakan, bantuan alat kesehatan merupakan permintaan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Presiden Jokowi secara khusus menyumbangkan 1 juta masker kain untuk warga Aceh. Satgas menambahkan 10.000 masker N-95 dan 10.000 masker KN-95 untuk dokter, serta 200.000 masker medis untuk perawat ditambah 10.000 pelindung muka," ujar Doni.

(AIN/HAM)

Judul	Upaya Bina Marga Pulihkan Ekonomi pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	Tanggal	Selasa, 25 Agustus 2020
Media	Kompas, halaman 16		
Resume	Pemerintah melalui Kementerian PUPR kembali menggalakkan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.		

Upaya Bina Marga Pulihkan Ekonomi pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggalakkan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Marga yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR juga telah melakukan berbagai upaya terhadap pemulihan ekonomi pada era adaptasi kebiasaan baru.

Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang amat serius. Oleh sebab itu, PKT yang merupakan aktivitas produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Program ini memberikan pekerjaan yang *low techno*, tetapi padat karya di perdesaan terutama ditujuikan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa. Jadi, distribusi uang pembangunan ke desa-desa masih bisa dilaksanakan karena kita pakai protokol kesehatan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dana sebesar Rp 10 triliun dianggarkan untuk melaksanakan PKT pada 2020 yang terdiri dari 7 program. Program tersebut di antaranya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan penataan kota tanpa kumuh (Kotaku).

Program padat karya ini menjadi salah satu langkah pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada pandemi ini karena dilaksanakan secara merata, terlebih di kota-kota besar yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

"Kita tahu, pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan ekonomi

menjadi stagnan, terutama di kota-kota besar yang menjadi episentrum. Kita juga melihat hilangnya kesempatan bekerja di perkotaan sehingga menimbulkan pengangguran. Eksodus dari kota besar ke kampung halaman juga membuat angka pengangguran di perdesaan ikut meningkat. Belum lagi pekerja migran Indonesia yang kembali ke Tanah Air karena perekonomian di negara tempat mereka bekerja ikut terdampak," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Penyelenggara prasarana

Hedy menjelaskan, fungsi Bina Marga dalam hal ini di antaranya adalah sebagai penyelenggara prasarana infrastruktur jalan. "Bagaimana selama pandemi ini transportasi logistik berjalan optimal. Meski terdapat pembatasan, pembatasan tersebut tidak mungkin dilakukan pada logistik karena mendukung kehidupan masyarakat. Tugas kita yang utama adalah menjaga agar sistem jaringan jalan berfungsi baik sehingga roda perekonomian bisa tetap berjalan," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Hedy, Bina Marga yang menjadi bagian dari strategi Kementerian PUPR menciptakan lapangan kerja melalui PKT. Program ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang dilakukan secara rutin dan nonrutin.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan PKT untuk pemeliharaan rutin jalan di antaranya pembersihan



saluran, pembersihan bangunan pelengkap (jembatan), pembersihan perlengkapan jalan (patok dan rambu), pengecatan sederhana kerb/



FOTO FOTO DOK. BINA MARGA



Sementara itu, jenis kegiatan nonrutin di antaranya adalah pengerjaan selokan dan saluran air, pemasangan batu dengan mortar, gorong-gorong dan selokan beton U, galian, lapis fondasi agregat, perkerasan beton semen, pasangan batu, beton dan beton kinerja tinggi, pasangan batu kosong dan bronjong.

Program padat karya yang dimulai pada Februari 2020 tersebut tetap dilakukan hingga sepanjang tahun ini sesuai kebutuhan untuk pemeliharaan rutin.

Pemberdayaan masyarakat

Program padat karya tersebut erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat karena memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kelebihan tenaga kerja. "Kita fokus kepada daerah-daerah

yang sekarang ini mengalami *over supply*, misalnya daerah-daerah yang menjadi kampung halaman para tenaga kerja yang awalnya bekerja di kota-kota besar seperti Jabodetabek," tambahnya.

Pelaksanaan program PKT di berbagai sektor ini diharapkan berdampak langsung secara positif pada ekonomi masyarakat. Angka pengangguran akibat wabah Covid-19 diharapkan bisa ditekan, sampai kemudian masyarakat bisa kembali hidup normal pascapandemi.

Pelaksanaan program PKT ini memiliki sejumlah tantangan, di antaranya daerah yang memiliki zona merah Covid-19. "Selain itu, tidak semua tenaga kerja yang menganggur mau atau cocok keterampilannya dengan yang kami sediakan," pungkas Hedy. [BYU]

Judul	Ruang Bertumbuh Sektor Baru	Tanggal	Selasa, 25 Agustus 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 7		
Resume	Setelah ekonomi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sempat lesu pada 2015, pemindahan Ibukota Negara (IKN) diharapkan memberikan dampak positif. Ekonomi Kaltim yang selama ini digerakan oleh pemanfaatan sumber daya alam, seperti tambang dan mineral, boleh jadi bakal bergeser.		



| PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA |

RUANG BERTUMBUH SEKTOR BARU

Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, bisa menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi di Bumi Etam. Penataan infrastruktur di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara terus dilakukan.

Tim Jelajah Infrastruktur
redaksi@bisnis.com

Setelah ekonomi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sempat lesu pada 2015, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan memberikan dampak positif.

Ekonomi Kaltim yang selama ini digerakan oleh pemanfaatan sumber daya alam, seperti tambang dan mineral, boleh jadi bakal bergeser. Seperti halnya peran ibu kota lainnya, sektor jasa dan niaga memiliki peluang tumbuh lebih cepat.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor penggalian dan pertambangan di wilayah Kaltim pada 2019 mencapai 45,49%. Lalu disusul industri pengolahan dengan kontribusi 17,77%. Di luar dua itu, sektor lainnya berkontribusi di bawah 10%. (Lihat ilustrasi)

Kalau pun ada sektor yang memiliki kontribusi PDRB mendekati 10% yakni sektor konstruksi. Dalam 3 tahun terakhir, kontribusi konstruksi meningkat. Hal itu setidaknya mengkonfirmasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim memang tengah bergeliat.

Harian Bisnis Indonesia berkesempatan melihat langsung pembangunan infrastruktur di Kalimantan melalui program Jelajah Infrastruktur Kalimantan 2020. Program itu bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Telekomunikasi Selular, PT Pertamina (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Sepanjang kegiatan itu berlangsung, keberadaan infrastruktur menjadi kebutuhan vital dalam proses pembangunan IKN ke depan karena banyak kebutuhan yang harus dibangun, mulai dari gedung pemerintahan hingga konektivitasnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan bahwa proyek IKN nantinya jangan sampai melupakan semangat awal yakni melakukan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antarkawasan.

Oleh karena itu, seluruh ele-

men masyarakat perlu dilibatkan, termasuk dari sisi penyerapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Jika tidak, yang dikhawatirkan Rahmad adalah terjadi konflik horizontal.

"Kita harapkan pemerintah Kaltim dan saya sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa diunggulkan, dan membantu pekerja juga menarik investor di Kaltim," katanya.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim, Heru Cahyono menjelaskan bahwa penetapan IKN menjadi asa baru dalam dunia arsitektur. Ekonomi Bumi Etam yang sempat minus 5 tahun lalu tidak dapat dipungkiri memberi efek domino.

Hal pertama yang dilakukan setelah ditetapkannya IKN balingnya adalah sektor konstruksi. Proyek-proyek diprediksi bakal melimpah.

Heru memberi catatan, pelaku konstruksi lokal harus dilibatkan dan jangan sampai hanya menjadi 'penonton' atas megaprojek itu.

Menurutnya, banyak cara bisa dilakukan salah satunya menjadikan pengusaha lokal ini sebagai subkontraktor. Contoh lainnya yakni badan usaha dengan skala nasional bisa melakukan kerja sama atau operasional gabungan.

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan idenya tersebut. Bukan itu saja, dia bahkan merencanakan agar ada peraturan presiden (perpres) terkait pemanfaatan tenaga lokal.

Payung hukum tersebut bukan tanpa landasan awal. Percepatan pembangunan Bandara Kulonprogo memiliki landasan setingkat itu. Begitu pula dengan percepatan pembangunan Papua.

"Kenapa kami memperjuangkan perpres? Ini kelasnya IKN kok. Jadi bukan hanya perda saja

Bisnis Indonesia JELAJAH INFRASTRUKTUR KALIMANTAN 2020

yang menjadi landasan hukum," jelasnya.

Selama 4 hari perjalanan Jelajah Infrastruktur Kalimantan 2020 dari 10—13 Agustus 2020, tim melihat langsung sejumlah proyek yang tengah digarap di Kalimantan.

Hari pertama tim jelajah melihat pembangunan *refinery development masterplan (RDMP) refinery unit (RU) V* PT Pertamina (Persero) yang terletak di Balikpapan.

Berdasarkan data Pemerintah Balikpapan, proyek tersebut telah menyerap 4.583 tenaga kerja hingga Juli lalu. Pada puncak pengerjaannya, pembangunan yang dikejar selesai pada 2023 ini akan menyerap 15.000 tenaga kerja.

Hari kedua tim bergeser ke pabrik Waskita Precast yang terletak di seberang Balikpapan, atau tepatnya Buluminung, Penajam Paser Utara.

Dari situ, tim kembali ke untuk menjajah tol Balikpapan—Samarinda. Sebelum ada jalur bebas hambatan, perjalanan memakan waktu 180 menit. Kini, bisa terpotong menjadi 75 menit.

Waktu berganti. Di hari ketiga tim jelajah mengunjungi pembangkit listrik tenaga uap serta

pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Tenggarong.

Hari terakhir bergeser ke lokasi yang bakal menjadi ibu kota yang baru. Lokasi itu berjarak sekitar 60 km dari Balikpapan, kondisi jalan tidak begitu bagus.

Lokasi IKN itu tidak jauh dari tempat wisata di Bukit Bangkirai yang berlokasi di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Bukit Bangkirai adalah kawasan wisata alam yang dikelola oleh PT Inhutani I Unit I Balikpapan. Meski namanya bukit, namun kawasan ini sebenarnya adalah hutan hujan tropis.

Kawasan Bukit Bangkirai memiliki luas mencapai 1.500 hektare. Di sini, bisa menemukan ribuan jenis flora dan fauna, termasuk pohon bangkirai itu sendiri.

Meski merupakan hutan hujan tropis, Bukit Bangkirai ternyata punya fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari penginapan berbentuk *cottage*, *jungle cabin*, restoran, kamar mandi, hingga kolam renang bisa ditemukan di sini.

Tempat ini ialah salah satu destinasi wisata alam yang ada di seputaran wilayah IKN yang baru di Kaltim. Bukit Bangkirai juga tak melulu menjelajah hutan dan melihat aneka flora serta fauna saja.

Jika ditempuh dengan perjalanan darat, wisatawan akan memakan waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Balikpapan.

Keberadaan sektor pendukung diharapkan nantinya benar-benar mampu menopang keberadaan ibu kota negara.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Kaltim Lisa Hasliana menyatakan proyek infrastruktur di Kaltim terus berjalan.

Dia menuturkan, sektor industri energi nantinya akan diarahkan untuk mendukung pemenuhan yang ada di kawasan IKN yang baru di Kaltim.

"Untuk semua terlibat dalam pembanguna di situ dari kawasan industri bisa dimanfaatkan untuk pemenuh IKN," katanya.

Lalu, untuk mendukung kebutuhan air bersih, pemerintah pusat juga telah melakukan persiapan. Yaitu pembangunan beberapa bendungan di beberapa lokasi di sekitar.

"Pendukung seperti air bersih, ada embung Sepaku-Semai, ada juga bendungan lain yang akan direncanakan," katanya.

Untuk kebutuhan daya listrik, telah ada pengembangan dari PLN. Saat ini sedang berproses. "Nanti bisa dukung IKN. Itu sedang berlangsung" ■



PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur (Rp miliar)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Harga berlaku	147.405	145.343	165.547	174.427	175.654
Harga konstan	128.603	125.386	126.625	127.390	130.859
Jumlah penduduk (ribu)	3.427	3.501	3.575	3.649	3.721
Pertumbuhan penduduk (%)	2,24	2,18	2,12	2,05	1,99

Sektor	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,98	7,90	7,92
Pertambangan dan Penggalian	46,6	46,56	45,49
Industri Pengolahan	18,93	18,15	17,77
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Sampah, dan Limbah	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	7,92	8,51	9,08
Perdagangan Besar dan Eceran	5,41	5,58	5,92
Transportasi dan Perhubungan	3,59	3,61	3,67
Penyedia Akomodasi dan Makan	0,92	0,96	1,02
Informasi dan Komunikasi	1,25	1,26	1,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	1,53	1,56
Real Estat	0,88	0,88	0,89
Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	1,97	1,93	2,02
Jasa Pendidikan	1,53	1,59	1,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,61	0,66
Jasa lainnya	0,6	0,63	0,69